

**STUDI KOMPARASI PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA**

**Oleh :  
Eka Veronika  
E1A018099**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang dalam penanganannya diperlukan upaya khusus agar mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penyidikan dan hambatan dalam proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian perbandingan hukum dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan reduksi dan kategorisasi data, lalu disajikan dalam uraian sistematis dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memiliki persamaan dan perbedaan didalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu diantaranya mengenai struktur penyidik, wilayah hukum, subyek, obyek, mekanisme penyerahan SPDP, cara mencari bukti, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghentian penyidikan. Disamping itu juga terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi baik di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya diantaranya yaitu adanya batasan waktu, anggaran yang terbatas dan masyarakat yang kurang mendukung. Adapun saran yaitu perlu ada koordinasi yang lebih baik lagi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya demi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi yang maksimal.

**Kata Kunci :** Komparasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

**COMPARATIVE STUDY OF INVESTIGATIONS IN CRIMINAL  
ACTIONS OF CORRUPTION AT THE CORRUPTION  
ERADICATION COMMISSION AND THE DIRECTORATE OF  
CRIMINAL INVESTIGATIONS, SPECIALLY POLDA METRO JAYA**

**By:**  
**Eka Veronika**  
**E1A018099**

**ABSTRACT**

*Corruption is an extraordinary crime which requires special efforts to eradicate corruption. One of the efforts made is to give authority to the Corruption Eradication Commission and the Directorate of Special Criminal Investigation of the Metro Jaya Police to conduct investigations into criminal acts of corruption. This causes the handling of the occurrence of integralization in corruption crimes so that there tends to be overlapping with authority. This study aims to find out the investigations and obstacles in the investigation process at the Corruption Eradication Commission and the Directorate of Special Criminal Investigation of the Polda Metro Jaya. This research is a qualitative research with sociological juridical research method. The data used are secondary data and primary data. The data obtained were then processed using data reduction and categorization, then described in a systematic description and analysis using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the Corruption Eradication Commission and the Directorate of Special Criminal Investigation of the Polda Metro Jaya have similarities and differences in conducting examinations of criminal acts of corruption, namely regarding the legal basis used, target, amount of loss, how to find evidence, arrest, detention, search, confiscation and termination of investigation. In addition, there are also several obstacles found in conducting investigations into criminal acts of corruption both at the Corruption Eradication Commission and the Special Criminal Investigation Directorate of the Polda Metro Jaya, including time constraints, limited budgets and unsupportive people. The suggestion is that there needs to be better coordination between the Eradication Commission and the Directorate of Special Criminal Investigation of the Polda Metro Jaya in order to create a maximum eradication of corruption.*

**Keywords:** *Comparative Investigations Corruption Crimes, Corruption Eradication Commission, dan Directorate of Special Criminal Investigation of Polda Metro Jaya.*